



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0617-A /VII/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PESERTA SEMINAR BADAN KEAHLIAN DPR RI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

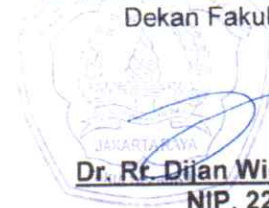
- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Badan Keahlian DPR RI dengan tema "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi dan Tantangan Ke Depan", yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2023-2024.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk :
 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Seminar Badan Keahlian DPR RI dengan tema "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi dan Tantangan Ke Depan", yang dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 29 Juli 2024
Tempat : *Online Zoom Meeting.*
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 2024
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Rt. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565



BADAN KEAHLIAN DPR RI
KEMENTERIAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
KEADILAN BERAGAMA



**BADAN KEAHLIAN DPR RI BEKERJASAMA DENGAN
IKATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (IP3I)**

SEMINAR DAN DISKUSI PANEL

“PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : EVALUASI DAN TANTANGAN KE DEPAN”



NARASUMBER



Dr. INOSENTIUS SAMBUL, S.H., M.Hum.
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



Prof. Dr. ASEP NANA MULYANA, S.H., M.Hum.
DIREKTOR ANGGARAN, FISCAL POLICY,
DIPLOMASI, NEGOSIASI, PERENCANAAN
KEFIDUKERAN DAN KEMISKINAN, SIP



HERIZ PAMBUJI, S.E., LL.M.
DEPUTI KESUBUDAYAAN
DIPLOMASI DAN NEGOSIASI

MODERATOR



Dr. Vaheri Sri Rahyan, S.H., M.H.
DIREKTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN
KEADILAN BERAGAMA



RIZATRI SUSANTI, S.H., LL.M.
KORDEKORUM DAN LITSI LEGISLASI



MARDISONORI, S.A.G., LL.M.
KORDEKORUM DAN LITSI LEGISLASI



CAHYAN SURYANDARI, S.E., LL.M.
DIREKTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN
KEADILAN BERAGAMA



ZOOM MEETING : 962 9640 2112
PASSCODE : 645716



SENIN
29 JULI 2024



RUANG KK II DPR RI



FREE SERTIFIKAT



www.bk.dpr.go.id



@bk.dprri



badan keahliaan dpr ri



badan keahliaan dpr ri



SERTIFIKAT

Nomor : 024/PN.04/BK.08/07/2024

Diberikan kepada:

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Seminar
Badan Keahlian DPR RI

**“PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
EVALUASI DAN TANTANGAN KE DEPAN”**

Jakarta, 29 Juli 2024



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI



SEMINAR DAN DISKUSI PANEL

"PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
EVALUASI DAN TANTANGAN KE DEPAN"

SEMINAR DAN DISKUSI PANEL "PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: EVALUASI DAN TANTANGAN KE DEPAN"

Your response has been recorded.

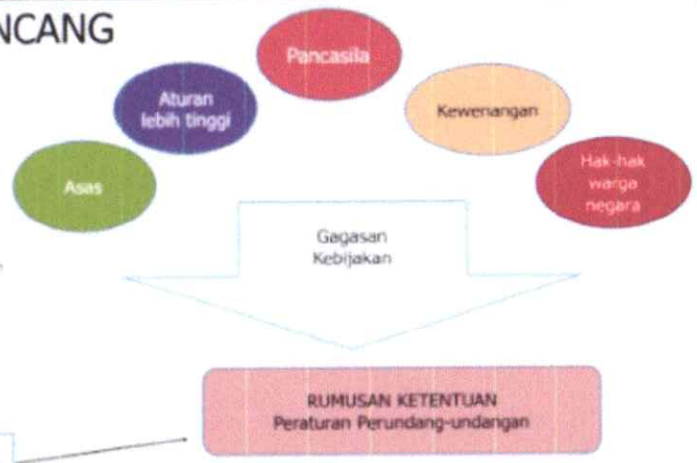
[Submit another response](#)

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

PERAN PERANCANG

1. Merumuskan ketentuan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila;
2. Merumuskan ketentuan yang didasarkan pada asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan;
3. Merumuskan ketentuan yang didasarkan pada teori atau asas-asas hukum terkait. (mis. teori pembaharuan kekuasaan, otonomi daerah, teori kewenangan dll);
4. Merumuskan ketentuan yang adil atau tidak diskriminatif;
5. Mengatur ketentuan yang sesuai dengan kewenangan pejabat yang diatur;
6. menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau melanggar kepentingan umum;
7. menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah;



Find a participant


- SW Sri Wahyuni, S.H.,M.H. (Me)
- BADAN KEAHLIAN D... (Host)
- BK BKD Krisna Murti... (Co-host)
- BK Badan Keahlian ... (Co-host)
- BD BKD DPR RI (Co-host)
- 22. Nety Kurnia_Pemkot Cilegon
- 2P 24_Ilmu Politik_Atana
- 6 645716
- AS A Setiyanto BKN
- AM ABDUL MUFLIHUN, SH_SETWA...
- AG Ade Gunawan
- ADE IYAN HERDIANA

Recording Sign in View

DASAR HUKUM:

IP3I Dibentuk Berdasarkan

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diganti dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0073576.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia



Unmute Start Video Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

Participants (260)

Find a participant

SW	Sri Wahyuni, S.H.,M.H. (Me)		
	BADAN KEAHLIAN D... (Host)		
BK	BKD Krisna Murti... (Co-host)		
BK	Badan Keahlian ... (Co-host)		
BD	BKD DPR RI (Co-host)		
	22. Nety Kurnia_Pemkot Cilegon		
2P	24_Ilmu Politik_Atana		
6	645716		
AS	A Setiyanto BKN		
AM	ABDUL MUFLIHUN, SH_SETWA...		
AG	Ade Gunawan		
	ADE IYAN HERDIANA		

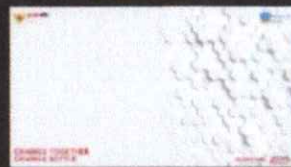
Invite Unmute Me

Partisipasi dalam Legislasi

- Perwujudan demokrasi Pancasila yang deliberatif, bukan sekadar demokrasi perwakilan.
- Mencegah legislasi bermasalah karena tidak menysasar akar masalah atau karena adanya kepentingan jangka pendek legislator.
- Kebijakan bisa berdampak buruk dan baik pada kelompok yang berbeda. Proses legislasi yang tidak partisipatif bisa memperbesar dampak buruk itu.



Sri Wahyuni, S....



Participants (268)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni, S.H., M.H. (Me)
- BADAN KEAHLIAN D... (Host)
- BK BKD Krisna Murti... (Co-host)
- BK Badan Keahlian ... (Co-host)
- BD BKD DPR RI (Co-host)
- S- Setjen - Achmad... (Co-host)
- 22. Nety Kurnia_Pemkot Cilegon
- 2P 24_Ilmu Politik_Atana
- AS A Setiyanto BKN
- A.Irfandi
- AM ABDUL MUFLIHUN, SH_SETWA...
- A Adam

Invite

Unmute Me